



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
TAHUN ANGGARAN 2005

**KEHIDUPAN MANTAN TAHANAN POLITIK G 30 S/PKI  
DI PEDESAAN KABUPATEN BANJARNEGARA PADA MASA  
ORDE BARU DAN MASA REFORMASI (1979-2002)**

Oleh:

**Purnawan Basundoro, SS. MHum  
Johny Alfian Khusyairi, S.Sos.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005  
Nomor Urut : 66

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**November, 2005**

POLITICAL PRISONERS



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
TAHUN ANGGARAN 2005

**KEHIDUPAN MANTAN TAHANAN POLITIK G 30 S/PKI  
DI PEDESAAN KABUPATEN BANJARNEGARA PADA MASA  
ORDE BARU DAN MASA REFORMASI (1979-2002)**

Oleh:

**Purnawan Basundoro, SS. MHum  
Johny Alfian Khusyairi, S.Sos.**

KKB  
KK-2  
LP 108/08  
Bas  
K

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005  
Nomor Urut : 66

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995247 Fax. (031) 5962066

E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  
DOSEN MUDA

1. Judul Penelitian : Kehidupan Mantan Tahanan Politik Di Pedesaan Kabupaten Banjarnegara Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi 1978-200
- a. Macam Penelitian : Terapan
- b. Kategori Penelitian : II
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda Tk/IIIB/132 230 679
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Sastra/Ilmu Sejarah
- f. Univ/Inst/Akademi : Universitas Airlangga
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Banjarnegara, Jawa Tengah
5. Kerjasama dengan Instansi lain : -
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000,-  
(enam juta rupiah)

Surabaya, 9 Desember 2005

Mengetahui:  
Pembantu Dekan I

Drs. Eddy Sugiri, M.Hum.  
NIP. 131 453 808

Peneliti

Purnawan Basundoro, S.S.M.Hum.  
NIP. 132 230 679

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP. 130 7101 125

## RINGKASAN

**KEHIDUPAN MANTAN TAHANAN POLITIK DI PEDESAAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA PADA MASA ORDE BARU DAN  
MASA REFORMASI 1978-2002**

Oleh: Purnawan Basundoro, Johny Alfian Khusairi

Hampir di semua daerah di Jawa rata-rata terdapat mantan tahanan politik G 30 S/PKI. Hal ini terjadi karena pada masa kejayaan Partai Komunis Indonesia, partai ini mampu menyedot anggota yang sangat banyak. Salah satu daerah yang juga terdapat mantan tahanan politik ini adalah Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Banjarnegara adalah kabupaten kecil dan hampir tidak pernah terdengar dalam pentas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kehidupan para mantan tahanan politik di Desa Kecepat dalam rentang masa Orde Baru dan masa Reformasi. Beberapa permasalahan yang diteliti meliputi, *pertama*, bagaimana kehidupan sehari-hari para mantan tahanan politik di desa mereka sepulang dari tahanan di Pulau Buru? Kehidupan sehari-hari itu meliputi interaksi sosial mereka dengan para kerabat dan masyarakat sekitar, kehidupan ekonomi, serta pandangan dan aktifitas politik mereka setelah mendapat berbagai hambatan dari pemerintah. *Kedua*, bagaimana masyarakat sekitar menerima kedatangan para mantan tahanan politik ini sepulang mereka dari Pulau Buru? *Ketiga*, dalam dua periode pemerintahan yang berbeda (Orde Baru dan Reformasi) adakah yang berubah dalam diri para mantan tahanan politik, serta perlakuan masyarakat dan pemerintah terhadap mereka?

Para mantan tahanan politik di Desa Kecepat ternyata memiliki kondisi kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan mantan tahanan politik di daerah lain. Hubungan sosial mereka dengan masyarakat lain cukup bagus. Kondisi pedesaan yang lebih mementingkan harmoni dari pada konflik secara terbuka telah membantu mereka mempertahankan hubungan sosial yang sebelum kepergian mereka ke Pulau Buru telah terjalin dengan baik. Hubungan sosial yang baik tersebut juga dibantu dengan status Desa Kecepat yang secara umum bukanlah basis anggota dan simpatisan PKI. Status ini telah memperingan "hukuman" sosial maupun politik atas desa ini, sehingga masyarakatnya pun tidak terlalu menanggung malu atas masa lalu desa mereka. Kondisi ini sangat berbeda dengan desa-desa yang dianggap sebagai "basis" PKI yang telah menyebabkan masyarakatnya dihukum baik secara sosial maupun politik secara berlebihan oleh desa-desa sekitar dan oleh pemerintah. Hukuman sosial dan politik biasanya menyebabkan para mantan tahanan politik menjadi bersikap lebih tertutup dan lebih hati-hati untuk bersosialisasi.

**Kata Kunci:** *Tahanan Politik, Banjarnegara, Orde Baru, Reformasi*

## KATA PENGANTAR

Secara umum pada masa pemerintahan Orde Baru semua mantan tahanan politik merupakan orang-orang yang harus dijauhi oleh rejim tersebut. Sebagian besar dari mereka harus rela menderita karena secara ekonomi harus hidup apa adanya karena hak-hak ekonomi mereka dibatasi sedemikian rupa. Demikian juga dengan kehidupan sosial para mantan tahanan politik. Rata-rata mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena stigma yang dilabelkan oleh penguasa bahwa mantan tahanan politik G 30 S/PKI adalah orang-orang yang telah berbuat dosa besar kepada bangsa dan negara, sehingga mereka wajib dijauhi. Kondisi ini diperkuat dengan berbagai aturan formal yang dibuat oleh pemerintah yang harus dianut oleh mantan tahanan politik seperti tidak diperbolehkannya mereka untuk ikut dalam pemilihan umum serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat formal.

Namun tidak semua mantan tahanan politik mengalami situasi yang sama. Dengan melakukan penelitian-penelitian di tingkat lokal dengan skup spasial yang lebih kecil akan ditemukan fakta-fakta yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Penelitian ini mencoba membuktikan hal tersebut. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa setiap daerah akan menghasilkan realitas sejarah yang berbeda-beda dengan tingkat keunikan yang berbeda pula.

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) utamanya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (DP3M) yang telah menyetujui dan membiayai penelitian ini.
2. Rektor Universitas Airlangga
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Airlangga yang telah memberi persetujuan dan mengusahakan dana penelitian.
4. Kepala Desa Kecepit yang telah meluangkan waktunya untuk memberi berbagai informasi tentang desa dan warganya.
5. Para mantan tahanan politik beserta keluarganya di Desa Kecepit yang telah memberi berbagai informasi tentang kehidupan pribadi dan keluarganya.
6. Para tokoh masyarakat Desa Kecepit dan para informan

Harapan kami semoga hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan referensi bagi yang membutuhkan. Terima kasih.

Surabaya, Oktober 2005

Tim peneliti

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS</b>	<b>5</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	<b>10</b>
3.1 Tujuan Penelitian	10
3.2 Manfaat Penelitian	10
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>12</b>
4.1 Lokasi Penelitian	12
4.2 Objek Penelitian	13
4.3 Metode Pengumpulan Data	13
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>15</b>
5.1 Panggung: Kecepatan	15
5.2 Kembalinya si Anak Hilang	24
5.3 Kebijakan dan Perilaku Politik	38
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>	<b>47</b>
6.1 Kesimpulan	47
6.2 Saran	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>50</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 merupakan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia sejak bangsa ini merdeka pada tahun 1945. Tidak saja karena pemberontakan yang gagal itu telah merenggut tujuh nyawa jenderal, tetapi peristiwa yang paling mengerikan justru terjadi pasca pemberontakan yaitu lenyapnya ratusan ribu nyawa manusia para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) akibat dibantai oleh lawan-lawan politik mereka. Jumlahnya mencapai ratusan ribu, bahkan beberapa peneliti asing sebagaimana dikutip oleh Hermawan Sulistyو menyebutkan angka yang sangat fantastis yaitu satu juta orang (Sulistyo, 2000: 44-45).

Pada masa Orde Baru hampir tidak ada catatan atau studi sejarah yang berusaha mengungkap fakta-fakta tentang kejadian pasca gagalnya pemberontakan G 30 S/PKI, terutama fakta tentang pembunuhan ratusan ribu simpatisan PKI. Bahkan kisah tentang para mantan tahanan politik yang baru keluar dari tahanan pemerintah Orde Baru pun hampir-hampir tidak pernah ada. Baru ketika Presiden Suharto jatuh yang menandai runtuhnya rejim Orde Baru, ada beberapa tulisan yang mengungkap fakta-fakta historis tersebut. Sejak runtuhnya Orde Baru seakan terjadi arus balik historiografi Indonesia. Sejumlah kelompok muncul dan menerbitkan berbagai catatan pribadi maupun studi yang





baru tentang peristiwa G 30 S/PKI serta rentetan peristiwa sesudahnya. Tetapi secara umum berbagai karya tersebut belum membuka ruang bagi penafsiran baru selain memperkuat alur-alur historiografi yang sudah ada.

Selain terbunuh dalam pembantaian masal pasca pemberontakan G 30 S/PKI, ribuan anggota dan simpatisan PKI lainnya menjadi tahanan politik pemerintah Orde Baru yang baru saja berkuasa, tanpa melalui proses peradilan (Crouch, 1998). Paling banyak dari mereka dikirim ke Pulau Buru, sebuah pulau terpencil di Kepulauan Maluku yang dikhususkan sebagai tempat penahanan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia klasifikasi B (Krisnadi, 2001: 75).

Penahanan para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pasca pemberontakan G 30 S/PKI oleh pemerintah Orde Baru merupakan upaya untuk mengasingkan mereka baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Mereka benar-benar terasing, jauh dari sanak saudara dan masyarakat asal mereka. Penderitaan mereka setelah bertahun-tahun disekap dalam pulau terpencil baru sedikit berkurang ketika pada tahun 1979 secara berangsur-angsur pemerintah Orde Baru mulai membebaskan mereka dari penjara. Secara bergelombang mereka meninggalkan Pulau Buru menuju kampung halaman mereka masing-masing.

Sebagai mantan tahanan politik, ketika mereka tiba kembali di kampung halaman rata-rata tidak mendapat sambutan yang simpatik baik oleh keluarga maupun oleh para tetangga mereka. Sikap pemerintah Orde Baru yang memberi label kepada para simpatisan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh

pemerintah membuat masyarakat takut untuk berhubungan secara langsung dengan para mantan tahanan politik yang baru kembali dari Pulau Buru. Hukuman paling berat yang dialami para mantan tahanan politik justru terjadi ketika mereka sudah keluar dari penjara yaitu hukuman sosial.

Hampir di semua daerah di Jawa rata-rata terdapat mantan tahanan politik G 30 S/PKI. Hal ini terjadi karena pada masa kejayaan Partai Komunis Indonesia, partai ini mampu menyedot anggota yang sangat banyak. Salah satu daerah yang juga terdapat mantan tahanan politik ini adalah Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Banjarnegara adalah kabupaten kecil dan hampir tidak pernah terdengar dalam pentas nasional. Di kabupaten ini hidup beberapa orang mantan tahanan politik G 30 S/PKI yang pernah dibawa ke Pulau Buru. Mereka tersebar di desa-desa di kabupaten ini (Laporan Kantor Sosial Politik Kabupaten Banjarnegara, 1990).

Sebagaimana ciri pedesaan di Indonesia pada umumnya, desa-desa di Banjarnegara adalah desa pertanian. Mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani. Kultur yang berkembang adalah kultur pedesaan dengan sistem kekerabatan yang sangat kental. Hubungan antar warga terjalin sangat erat. Sistem politik yang berkembang di daerah ini secara umum mengikuti sistem politik nasional, dengan kata lain sistem maupun kebijakan politik yang berkembang di tingkat pusat akan diikuti pula oleh otoritas politik yang ada di daerah ini. Pada masa Orde Baru warna politik dan pemerintahan Orde Barulah yang dianut oleh otoritas politik di kabupaten Banjarnegara. Demikian juga ketika

Indonesia menapaki era reformasi, masyarakat Banjarnegara juga larut dalam euforia reformasi (Renstra Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002-2004).

## 1.2 Rumusan Masalah

Para mantan tahanan politik G 30 S/PKI sejak mereka keluar dari penjara nampaknya tetap menjadi seorang "terhukum" dalam masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah terus menempelkan stigma kepada mereka sebagai orang yang pernah berdosa besar kepada Republik Indonesia. Baik secara sosial, politik, maupun ekonomi mereka tetap disingkirkan. Mengacu kepada latar belakang dari penelitian ini maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:

*Pertama*, bagaimana kehidupan sehari-hari para mantan tahanan politik di desa mereka sepulang dari tahanan di Pulau Buru? Kehidupan sehari-hari itu meliputi interaksi sosial mereka dengan para kerabat dan masyarakat sekitar, kehidupan ekonomi, serta pandangan dan aktifitas politik mereka setelah mendapat berbagai hambatan dari pemerintah.

*Kedua*, bagaimana masyarakat sekitar menerima kedatangan para mantan tahanan politik ini sepulang mereka dari Pulau Buru?

*Ketiga*, dalam dua periode pemerintahan yang berbeda (Orde Baru dan Reformasi) adakah yang berubah dalam diri para mantan tahanan politik, serta perlakuan masyarakat dan pemerintah terhadap mereka?

Ketiga permasalahan di atas akan menjadi inti dari penelitian ini.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS**

Istilah "tahanan politik" merupakan istilah baru yang baru muncul pada masa pemerintahan Orde Baru. Istilah tersebut tidak akan dapat ditemukan dalam kamus atau kitab-kitab hukum yang berlaku di Indonesia. Istilah ini berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan bagian-bagian hukum pidana politik, hukum pidana ekonomi, hukum pidana lingkungan, dan lain-lain (Ensiklopedi Indonesia, 1990). Secara umum tahanan politik dapat diartikan seseorang yang dikenakan tindakan penahanan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana politik. Dengan demikian istilah tahanan politik memiliki makna ganda. *Pertama*, status calon narapidana politik, artinya status yang dikenakan pada seseorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana politik sebelum vonis hukum dijatuhkan. *Kedua*, disandang oleh seseorang atau lebih hingga batas tak tertentu sampai ada putusan (politik) mengembalikan mereka ke masyarakat (Setiawan, 2001: ix-xlvi). Dengan demikian maka yang disebut sebagai tahanan politik G 30 S/PKI adalah orang-orang yang ditahan oleh pemerintah (Orde Baru) karena dituduh telah ikut serta dalam Gerakan 30 September Tahun 1965 yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (Kasdi, 2001). Konsep tersebut mengacu pada konsep "mantan tapol G 30 S/PKI" yang didefinisikan sebagai orang-orang yang pernah ditahan oleh pemerintah (Orde Baru) di Pulau Buru karena dituduh terlibat dalam G 30 S/PKI.

Secara umum, ketika pemerintah Orde Baru masih berkuasa, para mantan tahanan politik masih harus menanggung derita batin dan fisik. Aneka peraturan bersih diri, bersih lingkungan, penelitian khusus, kode Eks Tahanan Politik (ET) dan Organisasi Terlarang (OT), wajib lapor, tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum, dan sebagainya merupakan pembatasan yang diberlakukan sebagai kompensasi atas pembebasan mereka (Krisnadi, 2001: viii).

Nugroho Notosusanto dalam bukunya *Tercapainya Konsensus 1966-1969* mendefinisikan Orde Baru sebagai era pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Era Orde Baru merupakan antitesis dari pemerintahan Presiden Sukarno yang dianggap telah menyelewengkan UUD 1945. Menurut Nugroho era Orde Baru dimulai ketika ABRI bersama rakyat yang pancasilais menumpas pemberontakan G 30 S/PKI, tepatnya pada tahun 1965 (Notosusanto, 1985: 27). Era Orde Baru berakhir ketika Presiden Suharto menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada bulan Mei tahun 1998 setelah didesak mundur oleh berbagai elemen masyarakat. Mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan juga menjadi titik awal Indonesia memasuki Masa Reformasi. Mengenai definisi Masa Reformasi sampai saat ini belum jelas. Secara substansial tuntutan masyarakat pada akhir Orde Baru adalah hapusnya KKN, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal dari rancangan penelitian ini, sampai saat ini penelitian yang secara intensif mengkaji kehidupan para mantan tahanan politik G 30 S/PKI belum pernah dilakukan. Kalaupun ada buku yang

menceritakan kehidupan mereka kebanyakan berupa memoar atau biografi yang rata-rata ditulis oleh para mantan tahanan politik. Karena buku tersebut ditulis oleh para pelaku yang bersangkutan maka subyektifitasnya juga sangat tinggi. Isinya rata-rata berupa gugatan dan hujatan terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah memenjarakan mereka. Kajian yang bersifat ilmiah-akademis tentang kisah kehidupan para mantan tahanan politik sejauh ini belum pernah dilakukan. Beberapa buku yang mengkaji kehidupan tahanan politik atau biografi para mantan tahanan politik antara lain sebagai berikut. Buku pertama yang cukup penting dan mengilhami rencana penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh I.G. Krisnadi yang berjudul *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Buku yang diterbitkan oleh LP3ES ini diangkat dari tesis pengarang di Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Secara ringkas buku ini mengangkat kisah kehidupan para tahanan politik G 30 S/PKI selama sepuluh tahun mendekam di Pulau Buru.

Sejarah kehidupan tahanan politik di Pulau Buru menurut Krisnadi penuh dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah Orde Baru sengaja menutup-nutupi aib tersebut. Isu mengenai pelanggaran ini bahkan pernah diungkap oleh Amnesty Internasional, Komite "TAPOL" di Inggris, serta oleh negara-negara pendukung *The Universal Declaration of Human Rights*, khususnya Amerika Serikat ketika negara tersebut ada di bawah pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Sebagaimana judul dari buku ini, Krisnadi tidak mengungkap lebih jauh bagaimana nasib dan kehidupan sehari-hari para tahanan politik ini setelah mereka keluar dari Pulau Buru dan

kembali ke kampung halaman mereka. Padahal ada kemungkinan masih terjadi pelanggaran hak asasi atas mereka baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal inilah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kisah kehidupan para tahanan politik ini juga pernah diungkap dalam *Jurnal Gerbang edisi IV.9 Tahun 2002*. Paparannya terbatas pada masalah aktifitas pertanian yang dilakukan oleh para tahanan politik di Pulau Buru pada periode 1969-1979. Dungkap pula tentang pola-pola pembagian tanah serta struktur masyarakat yang terbentuk sejak kedatangan para tahanan politik G 30 S/PKI ke pulau itu. Menurutnya sejak kedatangan para tahanan politik ke pulau tersebut maka masyarakat akan terbagi ke dalam tiga golongan yaitu, *pertama*, masyarakat penduduk asli, *kedua*, masyarakat tahanan politik, serta *ketiga*, masyarakat keluarga tahanan politik. Jurnal tersebut juga tidak mengungkap sama sekali bagaimana kehidupan para mantan tahanan politik ketika mereka berbaur dengan masyarakat umum di kampung halaman mereka baik pada periode Orde Baru maupun pada masa Reformasi.

Buku-buku lain yang menceritakan nasib mantan tahanan politik rata-rata adalah memoar atau biografi perorangan, jumlahnya pun masih sangat terbatas. Buku-buku tersebut diantaranya *Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno*. Oei Tjoe Tat adalah salah seorang Menteri Negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang kemudian oleh Pemerintah Orde Baru dituduh sebagai simpatisan PKI. Tuduhannya itu menyebabkan ia harus mendekam di rumah tahanan Nirbaya, Jakarta. Dalam memoarnya ini ada satu

bab yang bercerita tentang kehidupan yang bersangkutan selepas dari tahanan pada tahun 1977. Namun karena hanya berujud memoar maka buku ini tidak menceritakan nasib mantan tahanan politik yang lain secara luas. Buku lain adalah *Kesaksianku tentang G 30 S/PKI*. Buku ini ditulis oleh Dr. H. Soebandrio, salah satu tokoh sejarah yang mengalami dan merasakan secara langsung meletusnya peristiwa G 30 S/PKI. Buku ini bisa dikatakan buku yang menceritakan kejadian pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta dengan prespektif yang berbeda dibandingkan dengan buku sejarah standar yang selama ini beredar, yang menceritakan tentang kejadian serupa.

Rata-rata buku-buku tersebut terbit setelah Orde Baru tumbang. Euforia gerakan reformasi sedikit banyak telah memberi andil terhadap pengungkapan fakta-fakta sejarah yang selama ini disembunyikan. Namun masih banyak kejadian penting yang terjadi pada masa Orde Baru belum diungkap sampai saat ini, salah satunya adalah kisah para mantan tahanan politik G 30 S/PKI



### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sehari-hari para mantan tahanan politik G 30 S/PKI setelah mereka kembali ke kampung halaman mereka dalam dua era pemerintahan yaitu pemerintahan Orde Baru serta pemerintahan Reformasi.

### 3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kelompok masyarakat yang terpinggirkan pada masa tertentu dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini terkait erat dengan kebijakan penanganan Hak Asasi Manusia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan terhadap tahanan politik selalu diikuti dengan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu maka penelitian ini:

*Pertama*, akan memberikan kontribusi yang cukup penting bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani orang-orang yang dianggap bersalah kepada negara, dalam hal perlindungan atas hak asasi mereka. Dengan mengungkap berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau maka diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

*Kedua*, fakta-fakta baru yang ditemukan dalam penelitian ini dapat untuk mengungkap lebih lanjut sejarah pemerintahan Orde Baru yang dipenuhi dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga penelitian ini bisa memberi kontribusi berupa data baru bagi penyusunan buku sejarah yang lebih lengkap dan lebih obyektif yang saat ini sedang disusun oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia yaitu buku Sejarah Nasional Indonesia versi baru.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kecepat Kecamatan Punggelan. Desa ini memiliki kedekatan secara emosional dengan peneliti karena merupakan desa yang berbatasan secara langsung dengan desa tempat tinggal peneliti. Peneliti sering mendengar cerita dari masyarakat setempat tentang ketegangan yang terjadi antar kelompok masyarakat di Desa Kecepat pada tahun 1965. Sedangkan alasan akademis yang menjadi dasar atas pemilihan Desa Kecepat sebagai lokasi penelitian adalah:

*Pertama*, Desa Kecepat baik secara geografis maupun kultural termasuk lingkungan pedesaan dengan ciri masyarakatnya yang khas sebagai masyarakat pedesaan Indonesia yaitu homogen dan memiliki sikap toleransi yang tinggi.

*Kedua*, desa tersebut memiliki sebuah sekolah dasar yang telah berdiri sejak tahun 1920-an yang merupakan sekolah dasar pertama di Kecamatan Punggelan dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam berbagai perubahan yang terjadi di desa tersebut. Salah satu sikap kritis yang muncul pada masyarakat setempat sebagai dampak dari keberadaan sekolah dasar tersebut adalah banyaknya masyarakat di desa Kecepat yang menjadi simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1960-an.



*Ketiga*, di Desa Kecepat terdapat orang-orang yang merupakan simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1960-an. Pasca G 30 S/PKI, sebagian dari jumlah tersebut ikut dibawa ke Pulau Buru dan baru kembali ke kampung halaman pada tahun 1978 dan tahun 1979.

#### 4.2 Objek Penelitian

Objek utama dari penelitian ini adalah para mantan tahanan politik G 30 S/PKI yang saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Namun demikian agar hasil penelitian ini lebih objektif maka objek penelitian atau sasaran penelitian akan diperluas yang meliputi masyarakat Desa Kecepat secara umum yang memahami secara lebih detail kehidupan para mantan tahanan politik, serta unsur pemerintah lokal.

#### 4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara mendalam (*interview*) kepada para mantan tahanan politik, kepada masyarakat desa, dan pejabat pemerintah lokal. Wawancara atau *interview* didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai kisah hidup mereka sejak kepulangannya dari Pulau Buru pada tahun 1978 sampai periode Reformasi sekitar tahun 2002.

Pada kenyataannya ketika penelitian ini selesai dilakukan, hasilnya adalah sebuah biografi singkat, kisah kehidupan para mantan tahanan politik sepulang mereka dari Pulau Buru walaupun hanya kisah yang sangat pendek. Mantan

tahanan politik yang berhasil diwawancarai hanya dua orang. Seluruh mantan tahanan politik Pulau Buru yang berasal dari Desa Kecepat sebenarnya ada empat orang, tetapi satu orang sudah meninggal dan satu orang meninggalkan desanya hijrah ke Jakarta menjadi penjual dawet.

Karena peristiwa yang diteliti meliputi rentang yang agak lama (sekitar 20 tahun), pada awalnya ada kekhawatiran bahwa mereka sudah mulai lupa dengan perjalanan hidup mereka. Bahkan dugaan sebagian orang bahwa pada umumnya mantan tahanan politik Pulau Buru telah dibuat "sakit" oleh penguasa Orde Baru, ternyata mereka tetap dalam kondisi sehat. Wawancara dilakukan sedermat mungkin dan secara hati-hati. Dengan demikian kemungkinan untuk mencampuradukkan fakta yang sebenarnya dengan fakta yang diliputi emosi sedikit mungkin bisa dihindari. Fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara ini pada awalnya akan dilengkapi dengan fakta-fakta tertulis yang kemungkinan masih ada. Tetapi ternyata amat sulit untuk mencari data-data tertulis yang memotret kehidupan para mantan tahanan politik ini. Hanya sedikit data yang diperoleh di kantor Koramil Kecamatan Punggelan, itu hanya berupa data statistik tentang orang-orang yang masuk daftar pengawasan pemerintah.

Tahapan selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah melakukan verifikasi terhadap fakta yang muncul. Verifikasi bertujuan untuk memilih fakta yang benar-benar otentik untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan sejarah. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan yang berupa cerita sejarah dari kehidupan para mantan tahanan politik.

**BAB V****HASIL DAN PEMBAHASAN****5.1 Panggung: Kecepatan**

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Apabila kita menggelar peta Propinsi Jawa Tengah, maka akan terlihat satu noktah dibagian tengah menggerombol bersama Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, dan Banyumas. Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang bergunung-gunung dan merupakan terusan dari pegunungan daerah Sunda (Jawa Barat). Di sisi selatan kabupaten ini terdapat pegunungan Kendeng, yang sedikit tandus membujur dari arah Barat ke arah Timur. Sementara di sisi Utara juga diapit oleh pegunungan..... yang sangat subur. Salah satu bagian yang paling menonjol dari pegunungan di bagian Utara Banjarnegara adalah pegunungan Dieng, yang berupa dataran tinggi tidak kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Dieng menjadi sangat terkenal dan menjadi kawasan pariwisata utama di Banjarnegara, karena terdapat tidak kurang dari lima buah candi kuno peninggalan peradaban Hindu serta terdapat puluhan kawah vulkanik yang aktif. Hampir persis di tengah-tengah, sungai Serayu membelah kabupaten ini menjadi dua Utara dan Selatan. Sungai ini merupakan gabungan dari anak-anak sungai yang sangat banyak, diantaranya adalah sungai Pekacangan, sungai terbesar kedua di Banjarnegara.

Kondisi geografis

Secara kultural, Banjarnegara merupakan bagian dari kebudayaan Banyumasan, yang memiliki ciri spesifik dan yang paling banyak diingat orang, adalah bahasanya yang berbunyi khas, dengan pengucapan huruf "k" yang sangat jelas, serta banyak kata-kata yang dalam konteks budaya Jawa "kraton" mesti diucapkan dengan huruf "o" namun diucapkan dengan ucapan huruf "a". Orang sering dengan nada meremehkan mengatakan bahwa orang Banyumas berbahasa "ngapak-ngapak", sebuah olok-olok yang tidak jelas maknanya.

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari delapan belas kecamatan. Sebelum tahun 1980-an, masing-masing kecamatan bergabung dengan tiga atau empat kecamatan lain membentuk satuan administrasi yang disebut kawedanan. Kawedanan berfungsi sebagai sistem koordinasi untuk beberapa kecamatan. Satuan administratif ini merupakan peninggalan jaman kolonial, yang pada waktu itu lebih populer disebut distrik. Sebelum satuan administrasi ini dihapus pada akhir tahun 1980-an, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari empat kawedanan, yaitu Kawedanan Banjarnegara, Wanadadi, Karangobar, dan Klampok.

Objek penelitian ini terdapat di Kawedanan Wanadadi. Secara geografis kawedanan ini memiliki wilayah yang paling luas. Kawedanan Wanadadi membawahi empat kecamatan, masing-masing adalah Kecamatan Wanadadi, Punggelan, Rakit, dan Banjarmangu. Di antara empat kecamatan tersebut, Kecamatan Punggelan memiliki wilayah yang paling luas. Kecamatan ini membawahi tujuh belas desa. Salah satu desa di Kecamatan Punggelan adalah Desa Kecepat, yang merupakan lokasi dari penelitian ini.

Desa Kecepatan terletak di bagian ujung Barat dari Kecamatan Punggelan, hampir berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Secara umum kawasan Kecamatan Punggelan memiliki rintangan geografis yang cukup sulit, apalagi pada tahun 1960-an sampai akhir tahun 1970-an. Di bagian utara hampir seluruh kawasannya terhalang oleh perbukitan yang ditumbuhi tanaman pinus dan semak-belukar. Di bagian bawah perbukitan ini mengalir sungai Gintung. Sungai ini juga menjadi batas administrasi dengan kabupaten Purbalingga. Sementara di bagian Selatan mengalir sungai yang cukup deras, yaitu sungai Pekacangan yang menjadi batas geografis dengan Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan rakit. Rintangan geografis ini telah menyebabkan hampir seluruh wilayah kecamatan Punggelan terisolir. Sebelum tahun 1970, satu-satunya jalan utama yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar penduduk Punggelan adalah jalan tembus dari ibu kota Kawedanan Wanadadi menuju Purbalingga. Jalan ini secara umum dapat dikategorikan jalan setapak, yang hanya bisa dilalui pejalan kaki atau kuda dan hewan ternak lain. Jalan utama ini baru dilebarkan dan dikeraskan (makadam) pada tahun 1975-an (*Wawancara dengan Sastrosumarmo, 15 Juni 2005*). Jalan utama ini memiliki cabang jalan yang cukup banyak yang menuju desa-desa yang terletak di lokasi yang lebih dalam. Sebagian besar jalan cabang tersebut merupakan jalan buntu, karena hampir semua desa di Kecamatan Punggelan berakhir di perbatasan geografis semisal perbukitan atau sungai.

Desa Kecepatan merupakan salah satu desa yang cukup besar baik dari luas wilayahnya maupun dari jumlah penduduknya. Berdasarkan perkiraan orang-



orang tua, pada tahun 1960-an desa ini memiliki penduduk tidak kurang dari 2000 orang. Pada tahun 1990, penduduk desa ini telah meningkat menjadi sekitar 4500 orang.<sup>1</sup> Sebagian besar penduduk Desa Kecepit memiliki pekerjaan utama sebagai petani baik sebagai petani pemilik lahan atau sebagai buruh tani. Sudah sejak awal abad ke-20 Desa Kecepit sudah menjadi desa terpenting di Kecamatan Punggelan, bahkan menjadi orientasi utama dari masyarakat Punggelan utamanya dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 yang salah satu kebijakannya adalah edukasi, pemerintah kolonial mulai membangun sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Pada awalnya sekolah-sekolah ini dibangun khusus untuk kaum priyayi dan hanya terletak di kota-kota kabupaten.<sup>2</sup> Namun lambat laun kebijakan ini diperluas ke wilayah-wilayah pedesaan. Kecepit adalah desa pertama di Kecamatan Punggelan yang memiliki sekolah. Sekolah pertama ini merupakan Sekolah Rakyat (*sekolah ongko loro*), yaitu sekolah untuk kaum pribumi rendahan. Sekolah Rakyat pertama ini didirikan sekitar tahun 1926. Guru-guru pemula untuk sekolah ini awalnya didatangkan dari kecamatan lain, tetapi ketika sekolah ini mulai meluluskan muridnya maka murid-murid pertama inilah yang kemudian direkrut menjadi guru. Guru-guru alumni Sekolah Rakyat Kecepit yang kemudian mengajar di almamaternya antara lain adalah Pak Adam, Pak Pujana,

---

<sup>1</sup> Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah penduduk desa Kecepit pada tahun itu. Data monografi desa yang terpampang di papan monografi di balai desa tidak pernah memuat secara pasti jumlah penduduk desa ini. Perkiraan angka tersebut berdasarkan ingatan Kepala Desa Kecepit, Bejo Suparjo, atas sensus penduduk tahun itu, yang data pastinya juga tidak dimiliki dan tertata di balai desa. Wawancara dengan Bejo Suparjo, 20 Juni 2005.

<sup>2</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 43

Ibu Rol. Mereka adalah guru-guru pemula yang mengajar di Sekolah Rakyat Kecepat (*Wawancara dengan Sarmidi, 7 Juni 2005*).

Sebagaimana telah diutarakan di bagian atas, Desa Kecepat kemudian menjadi orientasi utama masyarakat Punggelan dalam bidang pendidikan. Anak-anak Punggelan yang ingin bersekolah pasti akan datang ke Desa Kecepat, karena di desa inilah terdapat satu-satunya sekolahan. Kondisi ini berjalan sampai tahun 1950-an, ketika lambat laun di desa-desa lain juga berdiri sekolah. Keberadaan Sekolah Rakyat inilah yang telah membuka kesadaran baru bagi masyarakat pedesaan di pedalaman, serta membuka wawasan baru akan dunia luar. Lewat pendidikan ide-ide dari luar masuk, sekat-sekat informasi mulai terbuka. Sekolah telah menjadi media bagi masyarakat Desa Kecepat untuk mengenal lebih luas akan realitas di luar mereka. Pendidikan telah mendorong masyarakat pedesaan ini menjadi lebih progresif. Sehingga ketika Indonesia merdeka, mereka pun sadar bahwa mereka tidak dijajah lagi. Bahkan ketika perang kemerdekaan meletus, beberapa pemuda dari Kecepat ikut berjuang di luar desa mereka.<sup>3</sup>

Ketika "musim politik" tiba, kesadaran akan pentingnya memperjuangkan ide-ide progresif melalui media partai politik juga menghinggapi sebagian masyarakat Kecepat utamanya kaum muda. Beberapa dari mereka aktif menjadi pengurus partai di tingkat desa, sebagian lagi merupakan simpatisan. Pada Pemilu tahun 1955, komposisi perolehan suara di desa ini mencerminkan

---

<sup>3</sup> Salah satu pemuda Desa Kecepat yang ikut berjuang mengusir penjajah pada masa Perang Kemerdekaan adalah Juremi. Juremi berjalan kaki dari Desa Kecepat dari satu kota ke kota lain, sampai akhirnya terdampar di Kota Bandung yang berjarak sekitar 300 Km dari Kecepat. Di Bandung ia ikut bertempur melawan Belanda dan baru pulang ke Kecepat pada tahun 1950-an dan baru beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Wawancara dengan Suparto, 3 Juni 2005. Suparto adalah keponakan dari Juremi.

komposisi perolehan suara di tingkat nasional. Suara tertinggi diraih oleh PNI, menyusul Masyumi, Nahdatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Terlepas dari fakta-fakta perolehan suara dalam pemilu 1955, yang paling penting adalah bagaimana kesadaran untuk berpartai muncul di masyarakat Desa Kecepat, dan seperti apa peta ideologis yang mewarnai kesadaran itu.

Munculnya kesadaran untuk berpartai selain karena situasi nasional memang mengharuskan setiap warga negara untuk sadar politik, juga didukung oleh media lokal. Media lokal ini adalah Sekolah Rakyat yang menjadi inti tumbuhnya kesadaran untuk berpolitik dan menjadi media *transfer of ideology*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran Sekolah Rakyat sebagai media untuk transfer of ideology terutama apabila kita kaitkan dengan muncul dan tumbuhnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Desa Kecepat. Berbeda dengan Masyumi dan Nahdatul Ulama (NU) misalnya, yang menggunakan media mushalla, masjid, dan aktifitas pengajian sebagai media pembelajaran politik dan perekrutan anggota partainya, Sekolah Rakyat sebagai lembaga sekuler sangat tepat sebagai media untuk membangkitkan semangat berpolitik melalui saluran partai politik yang juga berideologi sekuler, yang terepresentasi dalam PNI dan PKI.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Kecepat mengenal Partai Komunis Indonesia (PKI) salah satunya adalah melalui Bapak Pujana. Beliau adalah salah seorang guru Sekolah Rakyat di desa ini. Nampaknya ia mulai mengenal Partai Komunis Indonesia sejak ia menjadi guru dan berkenalan dengan sesama guru dari luar

---

<sup>4</sup> Analisis ini akan menemukan pembenerannya dalam buku yang ditulis oleh Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

daerah. Bahkan ia adalah satu-satunya orang yang berlangganan surat kabar *Harian Rakyat*, surat kabar resmi milik Partai Komunis Indonesia (*Wawancara dengan Mhd, Mantan Tahanan Politik Pulau Buru, 21 Juni 2005*). Sebagai seorang guru, Pujana intensif berhubungan dengan bekas anak-didiknya, terutama dengan mereka yang sudah cukup dewasa dan yang sudah bekerja. Bahkan Pujana sering meminjami surat kabar *Harian Rakyat* kepada bekas muridnya, yang kebanyakan berasal dari Desa Kecepit. Pujana sendiri berasal dari Desa Punggelan yang berjarak sekitar empat kilometer dari Desa Kecepit. Melalui cara seperti ini, Partai Komunis Indonesia akhirnya masuk ke Desa Kecepit dan mendapat pengikut yang cukup banyak. Yang mengherankan, pengurus dan simpatisan partai ini rata-rata adalah pegawai negeri, yaitu guru, pegawai kecamatan, dan pegawai kesehatan. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi di pedesaan Jawa Timur yang sebagian besar simpatisan Partai Komunis Indonesia adalah para petani. Pengurus dan simpatisan Partai Komunis Indonesia di Desa Kecepit adalah kelas menengah, bukan kelas proletar. Bahkan Kepala Desa Kecepit tahun itu, Sastro Warsito juga simpatisan Partai Komunis Indonesia (*Wawancara dengan Sarmidi*). Sebagai kelas menengah nampaknya mereka sangat sadar akan keterlibatannya dalam partai politik, sampai akhirnya datang bencana 1965.

Dalam memori kolektif masyarakat Desa Kecepit saat ini, sebenarnya pada tahun 1965 atau tahun-tahaun sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa di desa mereka. Suasana tetap tenang, tidak muncul kekerasan yang disebabkan karena terjadinya polarisasi masyarakat dalam partai politik. Peristiwa yang

dianggap aneh oleh masyarakat Desa Kecepit pada waktu itu hanya satu yaitu ketika salah seorang warga desa setempat yang dianggap simpatisan PKI menyelenggarakan pertunjukkan wayang kulit *lakon* yang dipertunjukkan adalah *Bethara Guru mati*.<sup>5</sup> Padahal dalam dunia pewayangan *Bethara Guru* adalah dewa tertinggi dan identik dengan tuhan. Dengan demikian, melakonkan *Bethara Guru mati* mengindentikkan bahwa tuhan telah mati. Oleh masyarakat pada waktu itu dianggap bahwa inilah masa kebangkitan masyarakat anti Tuhan. Walaupun demikian pada waktu itu tidak ada respon apapun dari masyarakat, mereka hanya berbisik-bisik mengapa ada pertunjukkan wayang kulit dengan *lakon* seperti itu.

Suasana menjadi sangat mencekam justru terjadi ketika terdengar desas-desus bahwa Partai Komunis Indonesia telah melakukan perebutan kekuasaan dan membunuh banyak jendral di Jakarta. Aparat militer sebagai otoritas yang mulai menggeser otoritas sebelumnya secara sistematis menyebar isu yang memojokkan Partai Komunis Indonesia tersebut. Secara berlahan dan diam-diam, dan bekerja sama dengan masyarakat setempat yang non-PKI dan mau bekerja untuk tentara, mulai mengintai para kader, pengurus, dan simpatisan PKI di Desa Kecepit. Desas-desus yang secara sistematis digelar oleh tentara telah menyulut amarah warga Desa Kecepit kepada orang-orang yang ditengarai menjadi kader dan simpatisan PKI. Situasi yang semula tentram berubah total menjadi situasi marah. Dengan petunjuk para tentara, atau sebaliknya para tentara yang mendapat petunjuk dari penduduk setempat, satu persatu orang-orang yang ditengarai menjadi kader dan simpatisan PKI ditangkap. Untuk

<sup>5</sup> *Lakon* dalam pertunjukkan wayang kulit identik dengan "judul" dalam pertunjukkan film.

menciptakan suasana yang mencekam dan untuk menciptakan teror terhadap masyarakat, penangkapan sengaja dilakukan pada malam hari. Satu persatu mereka diseret keluar rumah, tangan diikat, kemudian dikumpulkan di balai desa. Beruntung, masyarakat tidak terpancing untuk melakukan kekerasan ala tentara, sehingga tidak sempat terjadi pertumpahan darah. Bahkan di hampir semua wilayah kabupaten Banjarnegara tidak terjadi pembunuhan terhadap mereka yang dituduh anggota dan simpatisan PKI.<sup>6</sup>

Sejak orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI menginjakkan kakinya di halaman rumah karena diseret oleh tentara, sejak saat itulah derita panjang mereka rasakan. Mereka ingat betul, pada waktu itu tanggal 12 Nopember 1965 malam (*Wawancara dengan Mhdn*). Malam itu juga dengan tangan terikat mereka dibawa ke ibukota Kabupaten Banjarnegara. Banyak tetangga kanan-kiri yang mengantar, tetapi bukan mengantar dalam suasana duka karena tetangga mereka akan pergi, melainkan dengan suasana yang amat marah karena terbakar emosi yang disulut oleh berita kejadian di Jakarta. Di tangan-tangan mereka terenggam pentungan, bambu runcing, golok, pedang, yang menciptakan suasana genting dan mendirikan bulu roma. Sampai di ibukota kabupaten mereka dimasukkan ke dalam sel. Hampir satu tahun di ibukota Banjarnegara, sampai akhirnya tahun 1966 dibawa ke Pulau Nusakambangan di Cilacap. Tahun 1970 dipindahkan ke Pulau Buru (*Ibid.*). Warga Desa Kecepat yang dibawa ke Pulau Buru ada empat orang, yaitu Mhdn, Smbd, Sdrs, dan Mhd.

---

<sup>6</sup> Bandingkan misalnya dengan situasi di Jawa Timur sebagaimana terungkap dalam buku yang ditulis oleh Hermawan Sulisty, *Palu Arit di LadangTebu*, (Jakarta: Gramedia, 2000).

## 5.2 Kembalinya si Anak Hilang: Interaksi Sosial dan Kondisi Ekonomi Mantan Tapol

Tahun 1978 akhir adalah gelombang pertama pemulangan tahanan politik dari Pulau Buru. Dengan demikian, maka apabila mereka telah ditahan sejak tahun 1965, minimal para tahanan politik ini telah ditahan tanpa diadili selama tiga belas tahun. Selama itu pula empat orang warga Desa Kecepat ikut merasakan penderitaan sebagai tahanan politik. Mereka berpindah-pindah dari penjara Banjarnegara, Nusakambangan, dan terakhir Pulau Buru, sebuah Pulau terpencil di Propinsi Maluku.

Ketika secara bergelombang para tahanan politik Pulau Buru dilepas, empat warga Desa Kecepat itu pun ikut dilepas. Mereka dipulangkan, namun antara satu orang dengan orang lainnya tidak bersamaan. Mhdn misalnya, ia yang paling awal pulang kampung, pada akhir tahun 1978. Berturut-turut menyusul Sdrs, Smbd, dan Mhd. Kembalinya mereka ke kampung halaman seperti kembalinya seorang yang telah hilang dari kampung halamannya. Masyarakat Kecepat semula tidak mengira bahwa mereka akan pulang. Bahkan ketika awal-awal mereka ditahan, sebagian besar keluarganya mengira bahwa mereka akan dibunuh oleh para tentara. Cukup lama keluarga para tahanan politik ini tidak mendapat kepastian, di mana mereka berada, karena memang mereka dilarang untuk berhubungan dengan keluarganya ketika awal ditahan. Baru ketika mereka dibawa ke Pulau Buru, ada kepastian yang jelas bahwa mereka ditahan di sebuah pulau yang amat jauh dari desa kelahiran mereka.

Jauh hari sebelum kepulangan mereka, para keluarga sudah mendengar kabar bahwa para tahanan politik akan dilepas. Namun tidak ada satupun dari

mereka yang tahu secara pasti kapan anggota keluarga mereka yang ikut ditahan akan dipulangkan. Sehingga ketika akhir tahun 1978 Mhdn mengawali pulang, terjadi kehebohan yang luar biasa di Desa Kecepit. Ia dipulangkan dari Pulau Buru melalui pelabuhan Semarang. Dari Semarang bersama sesama tahanan lain dari Banjarnegara, dengan dikawal tentara dinaikan bis sampai di Banjarnegara. Di ibukota kabupaten ini, terlebih dahulu harus melapor ke Komando Distrik Militer (KODIM) setempat, menandatangani banyak berkas, mendapat pembinaan dan diberi pesan-pesan yang amat banyak, sebelum akhirnya ia bisa pulang. Namun, Mhdn sempat mengalami kebingungan yang luar biasa ketika ia sudah diperbolehkan pulang dari kantor KODIM. Banyak pertanyaan menggelayut di dalam pikirannya, apakah masyarakat masih mau menerimanya? Ia telah dicap sebagai bagian dari kekuatan yang akan menyabot negara, membunuh para jenderal, dan memboikot pemerintahan yang sah. Pasti masyarakat akan menjauhkannya. Kebimbangan ini cukup lama, sampai akhirnya mengendap ketika ia duduk beristirahat di alun-alun Kota Banjarnegara. Ia pun memutuskan pulang (Wawancara dengan Mhdn).

Pulang ke Desa Kecepit juga bukan perkara mudah. Tahun 1978, transportasi dari Kota Banjarnegara ke Desa Kecepit tidak selancar saat ini. Apalagi ia juga dihinggapi perasaan malu dan bersalah yang luar biasa untuk bertemu dengan orang lain. Hingga akhirnya ia memutuskan diri untuk berjalan kaki menempuh jarak 20 Kilometer. Untuk menghindari bertemu dengan masyarakat sengaja ia mencari jalan pintas. Selama empat jam Mhdn menempuh perjalanan dari Kota Banjarnegara ke Desa Kecepit. Sampai di



rumah, keluarganya pun histeris, terutama ibunya. Tiga belas tahun mereka kehilangan kontak, akhirnya dapat bertemu kembali. Semua telah berubah. Mhdn sangat kurus, namun fisiknya masih nampak kuat. Sangat kontras dengan kondisi beberapa tahun sebelum tahun 1965. Pada waktu itu ia adalah petugas malaria (pemberantasan penyakit malaria) yang bertugas di Kota Banjarnegara, dan menjadi bagian kecil dari warga Desa Kecepat yang menjadi pegawai negeri.

Tahun 1978 merupakan awal dari kehidupan Mhdn untuk "bermasyarakat" kembali. Ia merasakan rasa canggung yang luar biasa ketika harus mengawali kembali, ibarat seorang bayi yang lahir langsung dewasa dan bisa berpikir, ia merasakan seolah-olah setiap mata menatap tajam ke arahnya, apalagi anak-anak muda yang ketika ia meninggalkan desa masih berusia anak-anak. Rata-rata mereka tidak mengenalnya.

!al serupa dialami oleh Sdrs.<sup>7</sup> Sdrs dipulangkan dari Pulau Buru pada awal tahun 1979, tidak lama setelah Mhdn pulang. Rumah mereka berdua berjarak cukup dekat, karena tinggal di satu kampung, yaitu di Kampung Perumbang, Desa Kecepat. Sebelum meletus peristiwa G 30 S, Sdrs merupakan orang terpandang di desanya. Ia adalah pegawai negeri di kantor Kecamatan Punggelan dengan posisi sebagai sekretaris (saat ini setara dengan Sekretaris Wilayah Kecamatan/Sekwilcam). Istrinya adalah guru di Sekolah Dasar Negeri Kecepat. Dalam struktur Partai Komunis Indonesia Kabupaten Banjarnegara waktu itu, ia memiliki posisi yang cukup bagus. Bahkan menurut cerita Mhdn yang diberangkatkan lebih dulu ke Pulau Buru, sebelum kedatangan Sdrs di

---

<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti tidak mewawancarai langsung Sdrs, karena pada tahun 1994 Sdrs meninggal dunia karena sakit. Peneliti hanya sempat berbincang-bincang dengan salah satu kerabatnya dan tetangga dekat.

pulau tersebut, di sana telah disediakan sebuah tempat khusus. Mhdn cukup heran dengan penyediaan tempat khusus tersebut. Pada waktu itu ia tidak tahu, untuk siapa tempat khusus tersebut, dan baru mengetahui ketika datang rombongan berikutnya. Ternyata tempat khusus itu untuk tetangganya sendiri dari Desa Kecepat.

Sebagai orang yang cukup terpandang, ketika Sdrs pulang ke kampung halamannya kembali, banyak sanak-saudara dan tetangga-tetangganya yang mengunjunginya. Hal serupa juga dialami oleh Mhdn, tetapi yang mengunjungi tidak sebanyak yang datang ke rumah Sdrs. Para tetangga mereka rata-rata tidak memiliki beban ketika harus berkunjung ke rumah para mantan tahanan politik ini. Di mata para tetangg, orang-orang yang pernah dibuang ke Pulau Buru dianggap sebagai orang-orang "hilang" yang telah kembali. Sehingga mereka patut untuk mengunjunginya, patut untuk merasa gembira bahwa tetangga mereka yang pernah hilang bisa berkumpul kembali dengan mereka. Mereka dengan sukarela menerima kembali kedatangannya tanpa memikirkan resiko-resiko politik karena berhubungan dengan mantan tahanan politik.

Baik Mhdn maupun Sdrs merasakan hal yang sama, yaitu bahwa tetangga-tetangga mereka masih bersikap baik, sebagaimana kondisi sebelum mereka meninggal Desa Kecepat tiga belas tahun sebelumnya. Dalam kecamatan Mhdn kondisi yang dihadapi ketika baru saja datang dari Pulau Buru tidak seimbang dengan desas-desus dan berita-berita yang beredar di pulau tersebut. Sebelum pulang mHdn memang merasa khawatir yang amat sangat, karena di Pulau Buru pada waktu itu beredar kabar bahwa nanti

sesampainya di tempat asal mereka akan terjadi balas dendam dari masyarakat.

Ternyata kabar tersebut tidak terbukti, sebagaimana dituturkan oleh Mhdn:

Reaksi masyarakat ternyata biasa saja... bahkan banyak yang berkunjung ke sini, datang ke sini... saya kira biasa saja. Jadi saya kira tidak seimbang (dengan) berita apa yang... yang diterima di sana. Akan begini, akan begini (maksudnya akan mendapat ancaman)... Malah kebalikannya. Kalau di sana beritanya... akan begini, akan begini... pokoknya macam-macam. Tetapi sesampai di sini ternyata biasa saja (*Wawancara dengan Mhdn*).

Kondisi serupa juga dialami oleh Sdrs. Ia merasakan masyarakat masih menerimanya walaupun ia berstatus sebagai mantan tahanan politik. Sebagai orang yang cukup terpandang di desanya, ia tidak merasa canggung untuk berkumpul kembali dengan masyarakat di desanya. Dan ia dengan sadar diri tidak berbuat "macam-macam" walaupun berasal dari keluarga terpandang. Sdrs kemudian lebih banyak aktif mengurus pertaniannya. Sebelum meninggalkan desanya ke Pulau Buru, ia memiliki lahan pertanian yang cukup luas, walaupun pada waktu itu tidak digarap sendiri karena pekerjaannya sebagai pegawai kantor kecamatan banyak menyita waktu. Setelah pulang dari Pulau Buru ia menggarap ladang-ladangnya dengan dibantu oleh tetangga-tetangganya.

Hal yang cukup menguntungkan sepulang dari Pulau Buru, Sdrs menjadi cukup ahli dalam bidang pertanian. Banyak ilmu bertani yang ia peroleh semasa di Pulau Buru. Di pulau tahanan tersebut memang para tahanan diberi ladang secara berkelompok. Ladang-ladang ini harus ditanami untuk mencukupi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Agar hasil pertanian mereka cukup baik, pada waktu-waktu tertentu mereka mendapat penyuluhan dari ahli pertanian

yang didatangkan ke Pulau Buru. Mereka juga banyak belajar dari penduduk setempat tentang cara-cara bertani yang baik.<sup>8</sup> Ketrampilan bertani inilah yang kemudian ia kembangkan di desanya. Dengan bantuan para tetangganya ia garap ladang-ladang miliknya. Hasilnya cukup bagus, bahkan banyak tetangganya yang kemudian bertanya cara-cara menanam ini menanam itu. Dengan sukarela Sdrs membagi ilmu bertani yang ia peroleh di Pulau Buru kepada tetangga-tetangganya yang bertanya. Dengan cara seperti itu maka hampir tidak ada "jarak" antara mantan tahanan politik dengan masyarakat kebanyakan. Kondisi ini ditambah dengan karakter Sdrs yang khas, apa adanya, sangat terbuka, dan berani. Sifat ini dalam kultur Banyumas disebut *blakasuta*, terus-terang, apa adanya. Tidak segan-segan Sdrs bercerita kepada tetangga-tetangganya tentang pengalamannya semasa berada di Pulau Buru, juga pengalamannya ketika aktif di Partai Komunis Indonesia tanpa ia merasa takut atau merasa diawasi oleh aparat negara. Dengan cara seperti ini ia merasa bebas, tidak memiliki beban, sehingga menghilangkan rasa tertekan sebagai mantan tahanan politik. Bahkan masyarakat Desa Kecepat hampir-hampir tidak pernah berfikir bahwa orang-orang dari Pulau Buru yang berada di desanya adalah orang-orang "jahat" yang harus dijauhi. Sdrs sendiri mendapat panggilan yang cukup terhormat untuk ukuran masyarakat desa. Ia biasa dipanggil "mbah", "mbah Drs".<sup>9</sup> Bukan sebutan mbah dalam konotasi negatif atau berkonotasi magis seperti mbah dukun misalnya, tetapi sebutan "mbah" sebagai

---

<sup>8</sup> Untuk kewajiban bertani bagi para tahanan diulas dengan sangat jelas dalam I.G. Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3ES, 2001.

<sup>9</sup> Para tetangga Sdrs memanggilnya dengan nama yang lebih pendek, Drs.

penghormatan untuk orang tua. Dalam keseharian masyarakat Desa Kecepit, panggilan untuk seorang yang berumur tua/kakek adalah "kaki", semisal "kaki Minari" untuk menyebut memanggil orang tua bernama Minari. Sebutan "mbah" hanya layak ditujukan untuk orang-orang terhormat, atau dari keluarga priyayi, minimal untuk seorang guru/pensiunan guru yang sudah tua.

Semasa ia berada di Pulau Buru, keluarganya yang ditinggal di Desa Kecepit memiliki problem yang cukup rumit. Istrinya yang bernama Mus, yang bekerja sebagai seorang guru Sekolah Dasar, hampir-hampir putus asa. Hidup tanpa seorang suami, menghidupi tiga orang anak yang masih kecil-kecil, serta keberadaan suaminya yang tidak jelas di mana tempatnya membuat istri Sdrs mengambil jalan pintas. Ia khianati kesetiaan suaminya dengan menerima lamaran seseorang yang tinggal di Kota Banjarnegara, Santoso. Dengan Santoso ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun beberapa tahun sebelum Sdrs pulang dari Pulau Buru, ia minta cerai dengan Santoso. Dan ketika Sdrs pulang dari Pulau Buru, Mus pun menerima Sdrs kembali sebagai suami pertamanya yang sah.

Kondisi yang cukup berbeda dirasakan oleh Smbd. Ketika ia pulang dari Pulau Buru ia merasakan perasaan tertekan yang amat sangat. Dan itu dialami selama bertahun-tahun. Ia merasa malu ketika bertemu dengan para tetangganya, sehingga ia lebih banyak menyendiri. Ketika pergi ke pasar ia pun lebih banyak sendiri dan nampak hati-hati sekali ia berbicara. Nampaknya Smbd mengalami trauma yang amat besar (*Wawancara dengan Suhardi, tetangga Smbd, 3 Juni 2005*).

Smbd ditahan bersama tiga tetangganya yang lain ketika ia baru saja menginjak umur dua puluh tahun karena ia lahir tahun 1945. Smbd merupakan anak Lurah Desa Kecepit pada waktu itu, Sastro Warsito. Sastro Warsito merupakan salah satu lurah terpandang di desa Kecepit, sehingga ia juga memegang jabatan sebagai *penatus*.<sup>10</sup> Sastro Warsito juga simpatisan Partai Komunis Indonesia, sehingga setelah G 30 S meletus ia dilengserkan tetapi tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor ke aparat militer di kota kawedanan Wanadadi seminggu sekali.<sup>11</sup> Sastro Warsito dikenal sebagai lurah yang tegas dan keras, dan terkesan *brangasan*. Sikap keras ini ditunjukkan misalnya ketika tahun 1950-an ia memerintahkan semua warga desanya bergiliran gotong-royong membangun jembatan permanen. Ketika ada warganya yang tidak mau atau lupa untuk kerja bakti maka tidak segan-segan ia melayangkan bogem mentah atau hantaman kursi kayu yang sedang ia duduki kepada warga tersebut (*Wawancara dengan Sarmidi*). Menurut ingatan penduduk Desa Kecepit, Sastro Suwito sebenarnya ikut ditahan tetapi dilepas kembali dan hanya wajib lapor. Kisah penahanannya cukup dramatis. Ketika itu ia sebenarnya sedang menegok anaknya, Smbd, yang dibawa aparat keamanan malam sebelumnya. Pada waktu itu Smbd ditransitkan di Kota Kawedanan Wanadadi. Nah, pada saat ia menjenguk anaknya itulah Sastro Suwito ditangkap. Anehnya, kuda tunggangannya yang ia jadikan alat transportasi ke Wanadadi mengetahui tuannya ditangkap, kuda itu langsung lari pulang ke Desa Kecepit sendirian.

<sup>10</sup> *Penatus* merupakan jabatan yang berfungsi sebagai koordinator dan membawahi untuk empat sampai lima lurah di sebuah kecamatan. Fungsi ini mirip dengan wedana yang mengkoordinir beberapa kcamatan, atau residen yang mengkoordinir beberapa bupati.

<sup>11</sup> Orang-orang yang berstatus seperti Lurah Sastro Suwito di Desa Kecepit cukup banyak, misalnya Sja (guru), Smr (guru), Mrt (tani), Nry (tani) (*Wawancara dengan Sarmidi*).

Sampai di rumah kuda tersebut langsung menuju dapur dan duduk seperti menangis menghadap istri Lurah Sastro Warsito.

Ketika Smbd ditahan, ia merupakan guru muda dan belum genap dua tahun mengajar. Ia mengajar di Sekolah Rakyat di desanya. Ia ingat betul peristiwa tanggal 12 Nopember 1965 di desanya. Siang itu datang ke rumahnya, menghadap ke bapaknya, Lurah Sastro Warsito beberapa tentara dari kota kabupaten. Bapaknya pada waktu itu langsung disuruh mengumpulkan seluruh warganya di pendopo kediamannya. Setelah semua kumpul, Sastro Warsito atas perintah tentara disuruh mendata warganya yang anggota atau simpatisan PKI. Pada waktu itu tidak ada yang tahu, bahkan Sastro Warsito sendiri apa maksud perintah tentara tersebut. Dengan serta merta Sastro Warsito berteriak ..."siapa yang anggota PKI mengacungkan jari, jangan takut, saya juga PKI..." Kata Sastro Warsito.<sup>12</sup> Dari kejauhan tentara-tentara sibuk mencatat siapa saja yang mengacungkan jari. Dan malamnya, pengkapan-penangkapan dilakukan. Smbd pun ditangkap di rumah yang dijadikan pertemuan warga pada siang harinya. Ia pun turut diikat dan diglandang beramai-ramai ke Kota Kawedanan Wanadadi, dan akhirnya berujung di Pulau Buru.

Smbd dipulangkan tahun 1979 setelah 14 tahun ditahan tanpa kejelasan status karena tidak ada pengadilan terlebih dahulu. Sepulang dari Pulau Buru ia langsung kembali ke orang tuanya yang sudah tua. Bapaknya, Sastro Warsito yang waktu ia ditahan masih berstatus lurah, sudah meninggal. Ia meninggal dalam status wajib lapor pada tahun 1969 dan dalam kondisi kejiwaan yang tidak

---

<sup>12</sup> Hampir sebagian besar warga Desa Kecepit ketika disuruh menceritakan situasi penangkapan para simpatisan PKI di desanya akan menceritakan hal serupa.

stabil serta kesepian. Pada waktu pulang, adiknya, Bejo Suparjo ternyata menggantikan bapaknya menjadi lurah.<sup>13</sup> Smbd pulang dengan kondisi tubuh yang tidak begitu sehat, sakit-sakitan. Penyakit TBC menahun yang diderita sejak ia ditahan di Pulau Buru seolah-olah menjadi oleh-oleh kepulangannya. Sebagai anak lurah, sebelumnya tidak pernah menderita dan selalu dilayani oleh pembantu-pembantu bapaknya. Sehingga ketika ia ditahan di sebuah tempat yang amat terpencil dan harus mengidupi dirinya sendiri ia tidak tahan. Ia digerogoti malaria dan asma/TBC. Penyakit ini terbawa sampai ia pulang ke Desa Kecepat.

Bertahun-tahun Smbd dihinggapi rasa rendah diri yang amat sangat, sehingga sangat sulit untuk bergaul. Untuk kehidupan sehari-hari ia ikut ibunya. Kebetulan adiknya menjadi lurah dan masih membujang sehingga bisa menghidupi keluarga besarnya. Smbd sangat membatasi berbicara dan membatasi pergaulan. Rasa percaya diri baru terpupuk kembali ketika sudah melewati hampir lima tahun sejak pulang dari Pulau Buru. Waktu-waktu luangnya banyak ia gunakan untuk menengok kebun-kebun milik orang tuanya. Kebetulan waktunya banyak luang karena ia belum memutuskan untuk berumah tangga. Seperti Smbd, Mhdn juga cukup lama membujang.

Berbeda dengan Smbd yang cukup lama dihinggapi rasa rendah diri, Sdrs dan Mhdn hampir tidak memiliki masalah dalam bergaul dan bersosialisasi kembali dengan tetangga-tetangganya. Sdrs banyak menggunakan

---

<sup>13</sup> Bejo Suparjo terpilih menjadi lurah pada tahun 1976, menggantikan Lurah Wiryadi. Wiryadi adalah Lurah Desa Kecepat yang menggantikan Sastro Warsito. Namun karena Wiryadi buta huruf, maka pada tahun 1976 diberhentikan dan diadakan pemilihan lurah kembali dengan Bejo Suparjo terpilih menjadi penggantinya. Bejo Suparjo adalah anak ke empat mantan Lurah Sastro Warsito (*Wawancara dengan Smbd, 15 Juni 2005*).



ketrampilannya bertani untuk lebih mendekatkan diri dengan tetangga-tetangganya sebagaimana telah diungkapkan di depan. Sementara itu Mhdn memanfaatkan kegiatan agama, seperti pengajian-pengajian untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sepulang dari Pulau Buru Mhdn kemudian mengikuti pengajian yang diajar oleh Bapak Maksudi satu minggu satu kali dan dilakukan pada malam hari. Maksudi adalah tokoh Muhammadiyah di Desa Kecepat. Dengan mengikuti kegiatan ini maka Mhdn merasa diakui keberadaannya tanpa merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh para tetangganya. Siang hari ia gunakan untuk bertani menggarap ladang milik orang tuanya. Ia jarang sekali bepergian untuk jarak yang jauh, dan hari-harinya ia gunakan untuk bertani. Sebagai orang yang cukup religius, malam hari ia gunakan untuk pergi ke mushalla yang ada di dekat rumahnya.

Pada awal kedatangannya di Desa Kecepat Mhdn memang merasa terasing. Ia melihat teman-teman sebayanya yang dulu ia tinggalkan sudah mapan, punya anak, punya istri, punya rumah, sementara dia tidak punya apa-apa. Apalagi banyak anak-anak yang waktu ia meninggalkan desanya belum lahir, saat ia pulang sudah besar-besar. Hampir satu tahun pikirannya tidak terarah, tidak punya pikiran yang jelas ia mau bagaimana dan mau apa. Selama satu tahun ia gunakan berbuat apa saja, utamanya bertani untuk membuang pikiran-pikiran negatif. Ia membuat rumah kecil di ladangnya, tempat ia menghabiskan hari-harinya yang panjang. Jam empat sore biasanya sudah masuk ke rumah kecilnya dan menyibukkan diri di dalam. Hidup menyendiri dan membujang ia lewati sekitar empat tahun.

Tahun 1983 ia memutuskan untuk menikah setelah didesak oleh tetangga-tetangganya. Ia menikahi putri dari Bapak Taryuni yang rumahnya berjarak sekitar 200 meter dari rumah kecilnya di kebun. Mhdn menikah dalam usianya yang sudah cukup tua 44 tahun karena ia dilahirkan tahun 1939. sementara istrinya masih sangat muda, dan waktu menikah belum genap berusia 20 tahun (*Wawancara dengan Mhdn*). Keluarga Taryuni nampaknya juga tidak merasa terganggu atau takut ketika istrinya akan dinikahi oleh Mhdn yang bekas tahanan politik dan aktif di Partai Komunis Indonesia. Sebagai keluarga petani mereka tidak berpikir macam-macam apalagi memikirkan resiko-resiko politik. Karena selama ini hampir tidak ada persoalan yang melibatkan para mantan tahanan politik. Mereka baik-baik saja bermasyarakat, juga tidak pernah terlihat mereka diawasi oleh aparat pemerintah. Ia justru sangat khawatir apabila anak-anaknya yang perempuan tidak ada yang melamarnya alias menjadi perawan tua. Beruntung bahwa Mhdn yang usianya hampir sama, bahkan mungkin lebih tua dari Taryuni, mau melamar anaknya. Perkawinan mereka dikaruniai tiga orang anak, semua perempuan. Anak pertama mereka sudah bekerja di sebuah pabrik garment di Jakarta setelah tamat dari SMEA. Sementara anak mereka yang terkecil sudah duduk di bangku SMP. Anak kedua mengikuti jejak kakaknya sekolah di SMEA di Kota Banjarnegara.

Pada saat menjelang pernikahan Mhdn sebenarnya juga sempat ragu, bagaimana nanti nasib anak-anaknya. Karena pada saat itu dimana kekuasaan Orde Baru masih sangat kuat ada aturan dari pemerintah yang amat ketat bahwa anggota keluarga yang tersangkut dengan G 30 S atau yang ada sangkut-

pautnya dengan PKI dilarang untuk menjadi pegawai, utamanya Pegawai Negeri Sipil. Namun keragu-raguan yang sempat menghinggapi pikirannya ditepis dengan pikiran bahwa dunia pasti berubah. Ia berkeyakinan bahwa kebijakan tersebut juga akan berubah, entah karena pemerintahnya yang berganti atau kebijakannya yang dicabut. Mhdn kemudian sangat yakin dengan hal tersebut, kondisi pasti akan berubah sejalan dengan berubahnya waktu. Menurutnya kekuatan manusia sifatnya terbatas, demikian juga dengan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan sesuatu sifatnya terbatas (*ibid.*). Dia juga sangat percaya, nasib ada di tangan Tuhan.

Berkaitan dengan aturan pemerintah Orde Baru yang melarang anak-anak mantan tahanan politik atau anak-anak orang-orang yang dituduh tersangkut dengan PKI tidak boleh menjadi PNS nampaknya tidak berlaku di Desa Kecepit. Dua orang anak dari Sdrs, yaitu Ww dan Hndr ternyata menjadi guru SMP. Demikian juga dengan anak dari Smr, warga Kecepit yang hanya diwajibkan apel ternyata juga menjadi guru SD, yaitu Ar dan Sgt.<sup>14</sup> Bahkan lurah Desa Kecepit untuk periode 1976-1988 dan periode 1999 – sekarang adalah anak dari Lurah Sastro Warsito yang juga terkena wajib apel. Ia adalah Bejo Suparjo. Namun anak-anak dari Mhdn tidak ada yang menjadi PNS. Anak pertamanya bekerja di Jakarta di sebuah pabrik garment, sedangkan anak-anaknya yang lain masih sekolah.

Smbd memilih membujang lebih lama dibandingkan Mhdn. Ia memutuskan menikah baru tahun 1989 dengan seorang gadis yang masih satu desa. Istrinya adalah lulusan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, berasal

<sup>14</sup> Secara pribadi peneliti banyak kenal dengan anak-anak dari mantan tahanan politik di Desa Kecepit.

dari Dukuh Sijambu. Pada waktu menikah Smbd sudah berusia 44 tahun karena ia lahir pada tahun 1945, sedangkan istrinya baru berusia 18 tahun. Beberapa tahun setelah menikah ia mencoba membuka toko kecil-kecilan di Pasar Manis, pasar terbesar di Kecamatan Punggelan. Ia menyewa tanah ukuran tiga kali lima meter dan mendirikan kios. Cukup lama kios itu tidak ditempati karena kekurangan modal. Ketika sudah ada modal, ia berjualan kebutuhan sehari-hari di kios tersebut. Namun entah karena tempatnya yang kurang strategis atau karena kalah bersaing atau karena ia mantan tahanan politik, usahanya tersendat-sendat sampai akhirnya bangkrut. Ia memutuskan untuk menutup kiosnya. Terakhir kios tersebut roboh karena pondasinya terbawa longsor. Untuk menghidupi keluarganya ia bertani, walaupun hasilnya tidak seberapa (*Wawancara dengan Smbd*).

Perubahan politik di Indonesia dari era Orde Baru ke era Reformasi ternyata tidak terlalu berpengaruh bagi para mantan tahanan politik di Desa Kecepit. Secara sosial atau dalam interaksi sosial tetap berjalan apa adanya. Apalagi era Reformasi juga tidak membawa perubahan apapun di Desa Kecepit. Kehidupan tetap biasa saja, apa adanya sebagaimana jaman sebelumnya (Orde Baru). Hak-hak para mantan tahanan politik yang pernah dirampas oleh penguasa Orde Baru juga tidak dikembalikan. Status mereka yang ditahan tanpa diadili juga tidak pernah disinggung oleh penguasa era Reformasi. Secara umum perubahan yang terjadi di hampir semua pedesaan di Indonesia memang tidak pernah terjadi secara mencolok. Perubahan yang mereka terima hanya usia

mereka sudah semakin tua, bahkan satu rekan mereka Sdrs sudah meninggal. Satu rekan lagi, Mhd, sudah hijrah ke Jakarta dan menjadi penjual dawet.

Beberapa tahun sebelum Orde Baru runtuh, para mantan tahanan politik dan simpatisan yang terkena wajib apel dari Desa Kecepatan memang pernah berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk membahas status mereka dan hak-hak mereka yang dihilangkan oleh penguasa. Salah satu hak mereka, utamanya yang berstatus sebagai PNS, adalah status PNS mereka dan gaji yang dicabut tiba-tiba tanpa status yang jelas. Hak inilah yang akan mereka perjuangkan. Namun usaha untuk mencari tahu hak mereka yang hilang tersebut tidak jadi diteruskan karena kondisi politik yang pada waktu itu masih represif. Tetapi ketika situasi politik berubah, niat mereka yang pernah tercetus pada masa Orde Baru juga tidak diungkap lagi karena mustahil akan berhasil. Bahkan ketika pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ada usaha untuk merehabilitasi mantan tahanan politik Pulau Buru, mereka hampir tidak memperhatikan lagi berita tentang hal itu. Bagi mereka rasanya hal yang mustahil bahwa mereka akan dipulihkan nama baiknya. Namun, mereka tetap gembira asal tetangga-tetangga mereka tetap memperlakukan mereka dengan baik dan manusiawi.

### 5.3 Kebijakan dan Perilaku Politik

Langkah politik Partai Komunis Indonesia (PKI) mencapai garis *finish* ketika keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), pada tanggal 11

Maret 1966. Dengan mengabaikan proses keluarnya surat perintah tersebut,<sup>15</sup> pengembalian surat perintah yaitu Mayjend Suharto pada tanggal 12 Maret 1966 secara resmi membubarkan Partai Komunis (PKI) Indonesia. Ali Murtopo salah satu arsitek Orde Baru dan Asisten Pribadi (ASPRI) Presiden Suharto mengatakan bahwa pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) mempunyai *rationale* strategisnya, yaitu untuk mematahkan peralatan strategis musuh, yang tidak hanya memiliki arti jangka pendek, tetapi dengan dilarangnya PKI dalam jangka panjang tidak lagi diberikan tempat kepadanya untuk mengambil bagian dalam mekanisme politik Negara Indonesia.<sup>16</sup> Dengan dasar Supersemar yang dikuatkan dengan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 maka PKI dijadikan musuh bersama seluruh komponen yang merasa menjadi bagian dari Orde Baru. Sejak saat itu seluruh simpatisan, anggota, pengurus PKI dilarang untuk melakukan aktifitas politik dalam bentuk apapun. Keberadaan mereka diawasi secara ketat melalui komponen Orde Baru dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Di pedesaan komponen pengawas ini diserahkan kepada polisi, komando rayon militer, dan aparat desa setempat.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan langsung yang diterapkan kepada mantan simpatisan dan mantan anggota PKI baik yang pernah ditahan atau pernah terkena kewajiban melapor adalah dengan memberi tanda khusus di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Tanda khusus tersebut adalah pemberian kode OT (Organisasi Terlarang) bagi simpatisan PKI yang tidak pernah ditahan

<sup>15</sup> Sampai saat ini Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) masih menjadi kontroversi. Keberadaannya juga tidak jelas karena tidak ada yang mengetahuinya, bahkan Arsip Nasional Republik Indonesia ternyata juga tidak menyimpan surat tersebut.

<sup>16</sup> Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1981), hlm. 141.

atau menjadi tahanan politik, dan kode ET (Eks Tahanan Politik) bagi yang pernah ditahan utamanya di Pulau Buru, pada KTP mereka. Kebijakan ini sebenarnya tidak pernah secara eksplisit diterapkan, karena dasar hukumnya juga tidak jelas. Namun demikian hampir semua mantan simpatisan dan mantan anggota PKI di KTP mereka terdapat tanda/kode tersebut. Kondisi serupa juga menimpa para mantan tahanan politik yang tinggal di Desa Kecepat, walaupun dengan masa berlaku yang berbeda dengan, mungkin para mantan tahanan politik di daerah lain.

Mhdn misalnya, dalam KTP nya juga pernah terdapat tanda ET. Namun menurut pengakuannya pemberian tanda tersebut tidak berlangsung lama, kira-kira hanya satu periode KTP. Manurutnya setelah KTP tersebut tidak berlaku dan muncul KTP yang baru ternyata tanda ET nya sudah hilang. Kalau pengakuan tersebut benar, maka tanda ET melekat di KTP Mhdn hanya sekitar 3 tahun pertama setelah dia pulang dari Pulau Buru. Hampir semua mantan tahanan politik di Desa Kecepat sebenarnya tidak terlalu risau dan memperhatikan tanda apapun di KTP mereka. Karena bagi hampir sebagian besar penduduk di desa ini KTP bukan merupakan benda yang berarti dan kegunaannya juga tidak terlalu penting. Hal ini juga diakui oleh Mhdn.

"Bagi saya Kartu Tanda Penduduk sebenarnya tidak banyak berarti. Paling-paling sebagai syarat kalau saya mau meminjam uang (hutang: pen.) di bank BRI. Sehingga saya tidak terlalu peduli dengan tanda ET atau yang lainnya. Walaupun saya mantan tahanan dari Pulau Buru tetapi saya bisa pinjam uang di BRI, lha... wong malah uang itu sering di *ider-ider* kan... (ditawar-tawarkan:pen). Siapa yang mau pinjam asal ada *boreg* (jaminan: pen) pasti dikasih. Selain itu KTP ya... tidak ada kegunaannya (Wawancara dengan Mhdn).

Hapusnya tanda ET di KTP milik Mhdn dan mantan tahanan politik lain di Desa Kecepat apakah merupakan kebijakan politik pemerintah daerah setempat atau bukan, tidak jelas asal-usulnya. Karena pada masa Orde Baru semua mantan tahanan politik mendapat pengawasan yang cukup intensif. Sebagai bukti dalam arsip Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Punggelan terdapat suatu data tentang orang-orang yang mesti diwaspadai di wilayah Kecamatan Punggelan. Data tersebut secara jelas menyebutkan bahwa mereka adalah mantan tahanan politik eks anggota PKI.<sup>17</sup>

Walaupun para mantan tahanan politik merupakan orang-orang yang patut diwaspadai dan diawasi, ternyata sebagian dari mereka tetap mendapatkan hak-hak politik. Sebagai contoh Mhdn ternyata tetap terdaftar sebagai pemilih setiap pemilihan umum. Seingat dia hanya pemilihan umum tahun 1982 saja dia tidak terdaftar sebagai pemilih. Waktu itu dia baru tiga tahun lebih pulang dari Pulau Buru. Selebihnya setiap pemilihan umum dia terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suaranya (*Wawancara dengan Mhdn*). Hal serupa juga dialami oleh Smbd. Dia tetap terdaftar sebagai pemilih dan bisa memberikan hak pilihnya di setiap pemilihan umum.

Diikutiannya mereka dalam setiap pemilihan umum, bagi para mantan tahanan politik merupakan "kelonggaran" yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian mereka cukup tahu diri untuk tidak kembali terjun dalam politik praktis. Diikutiannya mereka dalam pemilihan umum sudah merupakan anugrah

---

<sup>17</sup> "Daftar Pengurus Partai Politik di Kecamatan Punggelan Tahun 1989 dan Data Mantan Tahanan Politik" Dokumen stensilan diterbitkan oleh Komando Distrik Militer Banjarnegara.



yang tidak terkira, karena dengan demikian aksistensi mereka masih diakui walaupun hanya sedikit. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain maka kondisi para mantan tahanan politik di Desa Kecepat tergolong istimewa. Namun demikian kebijakan politik nasional terhadap para mantan simpatisan dan mantan anggota PKI beserta anak-anaknya yang cenderung represif pernah memancing reaksi yang keras dari Lurah Desa Kecepat, Bejo Suparjo.

Sebagai anak mantan simpatisan PKI, Bejo Suparjo merasa turut menjadi target dari kebijakan pemerintah Orde Baru, walaupun ia cukup beruntung bisa menjadi lurah di desanya. Menurutnya kebijakan pemerintah Orde Baru yang menyangkut-pautkan keturunan mantan simpatisan dan anggota PKI dengan orang tua mereka adalah kebijakan yang tidak rasional. Karena dengan kebijakan ini maka banyak keturunan mantan simpatisan dan anggota PKI yang tidak tahu-menahu sepak terjang orang tua mereka kemudian menjadi korban dan terlunta-lunta.

Bejo Suparjo dalam satu kesempatan sekitar awal tahun 1990-an pernah protes kepada aparat Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Punggelan tentang kebijakan tersebut. Pada waktu itu jabatannya sebagai lurah akan berakhir dan berniat mencalonkan kembali, tetapi dipersulit karena ia anak mantan simpatisan PKI. Pada waktu itu ia mencoba menanyakan kebijakan pemerintah terhadap keturunan simpatisan PKI. Ia katakan bahwa sebagai anak ia tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan mengapa ia yang harus menjadi korban. Namun pertanyaan bernada protes tersebut hanya

dijawab oleh aparat Koramil bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari komandan mereka.

Kasus lurah Bejo Suparjo ini memang agak aneh, mengingat anak-anak mantan simpatisan dan mantan anggota PKI yang lain ternyata bisa diangkat menjadi PNS. Sebagaimana telah diungkap di atas, anak dari Smr dan Sdrs bisa menjadi PNS. Jawaban yang tidak jelas dari Koramil telah membuat Bejo Suparjo terganjal untuk mencalonkan kembali menjadi lurah. Sebab persyaratan utama untuk menjadi lurah pada waktu itu adalah mendapatkan surat bebas G 30 S/PKI, sesuatu yang tidak diminta ketika ia pertama kali mencalonkan lurah pada tahun 1976. Dan selain mendapat jawaban yang tidak jelas, ia gagal mendapatkan surat bebas G 30 S/PKI karena aparat Koramil ternyata tahu bahwa bapaknya dulu diberhentikan dari jabatan lurah karena diindikasikan sebagai simpatisan PKI di Desa Kecepat. Periode tahun 1990-an merupakan periode yang cukup sulit bagi Bejo Suparjo karena ia harus menjadi pengangguran setelah gagal mencalonkan diri kembali menjadi lurah. Situasi yang tidak dialami oleh mereka yang benar-benar pernah menjadi tahanan politik, karena bagi mereka hidup dan situasi politik tetap mereka anggap sama dari periode ke periode. Bahkan ketika Orde Baru tumbang dan Indonesia menapaki jaman reformasi.

Situasi pedesaan yang cenderung stagnan dan tenang ternyata cukup menguntungkan bagi para mantan tahanan politik. Sebagaimana diakui oleh mereka, secara politis mereka ternyata tidak merasa sedang diawasi oleh aparat pemerintah. Semua berjalan biasa saja (*Wawancara dengan Mhdn*). Di kantor-

kantor pemerintah utamanya kantor polisi dan kantor Koramil memang terdapat daftar para mantan tahanan politik yang diharuskan untuk diawasi, namun mereka pun tidak terlalu ketat dalam mengawasi. Pengawasan hanya bersifat administratif, misalnya suatu saat para mantan tahanan politik mau mengurus surat-surat tertentu mereka akan dikenakan syarat-syarat tertentu atau sama sekali tidak diperbolehkan memperoleh surat-surat tersebut. Namun para mantan tahanan politik cukup sadar diri untuk tidak berhubungan dengan kantor-kantor tersebut, disamping mereka juga tidak membutuhkan apapun dari kantor-kantor itu. Mereka tidak pernah membutuhkan surat-surat penting dari lembaga pemerintah karena aktifitas sehari-hari mereka hanya bertani dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain yang tidak membutuhkan hubungan dengan kantor pemerintah.

Situasi stagnan tersebut juga terjadi ketika era reformasi tiba. Mereka tidak menyambut pergantian rejim tersebut dengan suka cita atau ekspresi berlebihan lainnya. Mereka menyadari bahwa pergantian rejim tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Apalagi ketika pergantian rejim tersebut berlangsung usia mereka sudah semakin tua, bahkan salah satu mantan tahanan politik yaitu Sdrs sudah meninggal dunia. Mereka juga tidak tertarik lagi untuk misalnya ikut-ikutan menuntut kepada pemerintah agar mereka direhabilitasi karena mereka menganggap tidak bernah bersalah. Bagi para mantan tahanan politik di Desa Kecepat pengakuan kembali saudara-saudara dan tetangga-tetangga mereka atas keberadaan mereka sudah cukup. Mereka sudah cukup senang para tetangga tidak pernah mengungkit masa lalu mereka.

Apalagi aspirasi politik mereka ternyata juga diakui oleh pemerintah dengan diikutkannya mereka dalam pemilihan umum.

Walaupun rejim Orde Baru telah tumbang dan berganti era reformasi yang diyakini akan membawa perubahan, namun kebijakan pemerintah atas para mantan tahanan politik tidak berubah. Wacana tentang rehabilitasi atas para mantan tahanan politik G 30 S/PKI memang pernah digulirkan, bahkan wacana tersebut semakin santer terdengar pada era pemerintahan Abdurachman Wahid. Namun wacana tersebut mengundang pro dan kontra. Elemen Islam paling mengecam rencana tindakan tersebut, karena mereka adalah korban utama ketika PKI mendapat angin di Indonesia. Di tingkat lokal kebijakan atas para mantan tahanan politik juga tidak berubah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pemegang otoritas tertinggi di wilayah Banjarnegara juga tetap menganggap para mantan tahanan politik sebagai kelompok "yang harus diwaspadai". Hal ini terlihat di dalam Rencana Strategis (renstra) Kabupaten Banjarnegara tahun 2001-2004, masih dicantumkan daftar mantan tahanan politik G 30 S/PKI. Keterangan dalam daftar tersebut menyebutkan bahwa mantan tahanan politik G 30 S/PKI adalah kelompok masyarakat yang harus diwaspadai dan merupakan ancaman laten bagi masyarakat Banjarnegara.<sup>18</sup>

Dimasukkannya para mantan tahanan politik sebagai bagian dari "ancaman" masyarakat menunjukkan bahwa perubahan rejim politik di Indonesia tidak diikuti dengan perubahan kebijakan politik atas para mantan tahanan politik. Perubahan yang signifikan hanya terjadi dengan dihapuskannya simbol

---

<sup>18</sup> Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. "Renstra Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2004." Tidak Diterbitkan, Banjarnegara, 2001, hlm. 33

OT dan ET pada KTP mereka, walaupun bagi para mantan tahanan politik di Desa Kecepit penghapusan simbol tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Respon mantan tahanan politik di Desa Kecepit atas berbagai wacana yang berkembang juga biasa saja. Artinya mereka tidak menanggapi secara berlebihan. Ketika mereka ditanya tentang rencana pemerintah merehabilitasi mereka dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tanggapan mereka cukup pasif. Bagi mereka pembentukan KKR hanyalah satu anak tangga untuk mencapai rehabilitasi. Menurut mereka jalan untuk menuju rehabilitasi pastilah amat panjang dan berbelit-belit karena pembentukan KKR mendapat respon yang beragam, ada yang kontra dan ada yang pro. Mereka menganggap kalau pun suatu saat rehabilitasi tersebut bisa terlaksana, mungkin mereka hanya menikmatinya di alam kubur karena saat ini usia mereka sudah tua. Mantan tahanan politik di Desa Kecepit tidak terlalu berharap dengan rehabilitasi. Bagi mereka yang terpenting saat ini adalah bisa hidup tenang tanpa diganggu dengan urusan-urusan yang bisa mengingatkan kejadian-kejadian pada masa lalu yang cukup menyulitkan.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Secara umum pada masa pemerintahan Orde Baru semua mantan tahanan politik merupakan orang-orang yang harus dijauhi oleh rejim tersebut. Sebagian besar dari mereka harus rela menderita karena secara ekonomi harus hidup apa adanya karena hak-hak ekonomi mereka dibatasi sedemikian rupa. Demikian juga dengan kehidupan sosial para mantan tahanan politik. Rata-rata mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari lingkungan mereka. Hal ini disebabkan karena stigma yang dilabelkan oleh penguasa bahwa mantan tahanan politik G 30 S/PKI adalah orang-orang yang telah berbuat dosa besar kepada bangsa dan negara, sehingga mereka wajib dijauhi. Kondisi ini diperkuat dengan berbagai aturan formal yang dibuat oleh pemerintah yang harus dianut oleh mantan tahanan politik seperti tidak diperbolehkannya mereka untuk ikut dalam pemilihan umum serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat formal.

Para mantan tahanan politik di Desa Kecepit ternyata memiliki kondisi kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan mantan tahanan politik di daerah lain. Hubungan sosial mereka dengan masyarakat lain cukup bagus. Kondisi pedesaan yang lebih mementingkan harmoni dari pada konflik secara terbuka telah membantu mereka mempertahankan hubungan sosial yang sebelum kepergian mereka ke Pulau Buru telah terjalin dengan baik. Hubungan sosial yang baik tersebut juga dibantu dengan status Desa Kecepit yang secara umum

bukanlah basis anggota dan simpatisan PKI. Status ini telah memperingan "hukuman" sosial maupun politik atas desa ini, sehingga masyarakatnya pun tidak terlalu menanggung malu atas masa lalu desa mereka. Kondisi ini sangat berbeda dengan desa-desa yang dianggap sebagai "basis" PKI yang telah menyebabkan masyarakatnya dihukum baik secara sosial maupun politik secara berlebihan oleh desa-desa sekitar dan oleh pemerintah. Hukuman sosial dan politik biasanya menyebabkan para mantan tahanan politik menjadi bersikap lebih tertutup dan lebih hati-hati untuk bersosialisasi.

Disamping karena kondisi yang bersifat kasat mata, hubungan sosial yang lebih baik bagi para mantan tahanan politik di Desa kecepit juga didukung oleh faktor-faktor batiniah masyarakat desa tersebut yang selalu menganggap semua warga desa sebagai *sedulur*. Konsep *sedulur* mengandung pengertian bahwa siapapun dan apapun status tetangga mereka, mereka anggap sebagai saudara. Apa yang dirasakan oleh tetangga akan mereka rasakan sebagai bagian dari dirinya. Apabila tetangga teraniaya maka merekapun merasakan sakitnya dianiaya, apabila tetangga merasakan senang mereka pun ikut menikmati kesenangan tersebut. Dengan konsep *sedulur* ini maka harmoni tetap terjaga dengan baik.

Walau pun secara sosial kondisi mereka cukup beruntung, namun secara ekonomi mereka cukup kesulitan. Rata-rata mantan tahanan politik di Desa Kecepit sebelum mereka ditahan pada tahun 1965 berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan kondisi ekonomi yang cukup mapan. Namun setelah mereka kembali dari Pulau Buru status mereka telah dicabut secara paksa oleh

pemerintah. Dengan demikian mereka dalam kondisi tanpa pekerjaan (*jobless*). Tidak ada jalan kecuali bekerja apa adanya, dan rata-rata mereka menjadi petani dengan kondisi penghasilan apa adanya.

## 6.2 Saran

Penelitian tentang kehidupan para mantan tahanan politik G 30 S sampai saat ini masih sangat sedikit. Upaya-upaya untuk menuju kepada rekonsiliasi sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak perlu didukung. Salah satu lembaga yang saat ini sedang digagas untuk menjembatani rekonsiliasi tersebut adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Agar dalam masa mendatang – apabila lembaga ini efektif bekerja- kerja KKR benar-benar dilandasi dengan dasar-dasar dan semangat akademik yang tinggi dengan tidak hanya membela golongan tertentu maka diperlukan pula data-data yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu penelitian lebih lanjut untuk tema serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Kasdi. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Ali Moertopo. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CSIS, 1981
- Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, 1990
- Hermawan Sulistyو. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.
- Hersri Setiawan. "Penjara dan Tahanan Politik," Pengantar pada I.G. Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- I.G. Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Jurnal Gerbang edisi IV.9 Tahun 2001*.
- Kantor Sospol Kab. Banjarnegara. "Laporan Kantor Sosial Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 1989." Laporan Tdk Diterbitkan, Banjarnegara 1989.
- Nugroho Notosusanto. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. "Renstra Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2004." Tidak Diterbitkan, Banjarnegara, 2002.
- Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo (ed.). *Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno*. Jakarta: Hasta Mitra, 1998.
- Soebandrio. *Kesaksianku tentang G 30 S/PKI*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001.

**Informan:**

**1. Mantan Tahanan Politik**

Nama : Mhdn  
Umur : 66 Tahun  
Pekerjaan Th. 1965 : Petugas Cacar (Mantri Cacar)  
Pekerjaan Sekarang: Tani

Nama : Smbd  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan Th. 1965 : Guru  
Pekerjaan Sekarang: Wiraswasta

**2. Masyarakat Umum**

Nama : Sarmidi  
Umur : 63 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan Guru

Nama : Suparto  
Umur : 73 Tahun  
Pekerjaan : Modin

Nama : Sastro Suwarno  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Nama : Suhardi  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Tani

Nama : Bejo Suparjo  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Lurah (Kepala Desa Kecepit)



